

## **Analisis Pengelolaan APBDesa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora**

**Supartiningsih**

Ekonomi Pembangunan,

Universitas Negeri Semarang

nandaaja893@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/ie.v3i1.422>

P-ISSN 2829-3843 | QRBN 62-6861-9234-468

### **ABSTRAK**

Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya peraturan menteri ini, desa seharusnya lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, terdapat peluang yang lebih baik bagi kota untuk memantau keuangannya, transparan dalam pengeluarannya dan mematuhi anggaran yang ketat yang mempertimbangkan segala aspek. Penduduk desa Sendanggayam telah mulai mengubah cara pandang mereka untuk maju secara fisik dalam berbagai dimensi. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara detail topik yang dibahas dengan mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis data yang relevan. Data yang diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan dideskripsikan dan dikaji oleh penulis untuk menilai kinerja keuangan. Namun, saat ini kami sedang berupaya untuk mengatasi beberapa permasalahan ini agar pertumbuhan Desa Sendanggayam dapat terus meningkat setiap tahunnya. Dalam upaya membantu kemajuan Desa Sendanggayam, penelitian ini mengkaji pengelolaan pembangunan fisik dalam APBDes Desa.

**Kata kunci:** pengelolaan APBDESA, pembangunan fisik, kemajuan desa.

## PENDAHULUAN

Bidang akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat sejak daerah-daerah di Indonesia merdeka. Yulitiawati dan Rusmidarti (2021) mengartikan otonomi daerah sebagai kemampuan daerah otonom untuk mengelola dan mengarahkan operasional pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum. Masyarakat lokal diberikan kewenangan untuk mengendalikan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia guna meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan dan kemajuan mereka melalui hak otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dimungkinkan pada tingkat paling dasar, yaitu tingkat desa.

Dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah dan diakui secara hukum. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak-hak leluhur dan tradisional (Hala dkk., 2022).

Peningkatan beban tugas dan tanggung jawab daerah merupakan kompromi demi penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur, mengelola dan mengurus urusannya sendiri. Meskipun demikian, belum terlambat untuk memikirkan pembentukan tata kelola desa. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan pemerintahan sebagian besar menyasar pemerintah desa karena komunikasi langsung mereka dengan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, yang mengatur pengelolaan keuangan desa, memungkinkan otonomi praktis, alih-alih sekadar desentralisasi normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan. Peraturan menteri ini bertujuan untuk menjadikan desa lebih akuntabel dan transparan, yang seharusnya membuat mereka lebih baik dalam mengelola keuangan, melaporkan secara terbuka, serta mengatur pengeluaran dan penerimaan mereka (Hanafi, 2015).

Layaknya pemerintah negara bagian dan federal,

pemerintah desa dapat mengendalikan dan mengatur komunitasnya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya di bawah wewenang ini, pemerintah desa memiliki sarana untuk berhasil. Kapasitas setiap kota dalam memperoleh dan membelanjakan uang sangat berbeda. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Rahmawati, Handayani, dan Syafik (2022), peraturan daerah, yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menjabarkan secara spesifik bagaimana uang akan dikumpulkan dan dibelanjakan dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan daerah mengatur rencana keuangan tahunan pemerintah desa, yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang ditinjau dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Daerah otonom dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah daerah yang menjadi sasaran utama skema desentralisasi fiskal berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui kebijakan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terdapat korelasi langsung antara kompetensi aparatur pemerintah desa dan tingkat keterlibatan masyarakat, karena pertumbuhan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Ketika warga dilibatkan dalam setiap langkah proyek pembangunan, mulai dari *brainstorming* hingga inspeksi akhir, akan lebih mudah untuk mengukur kinerja aparatur desa.

APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Singkatan ini merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan di tingkat desa, memuat sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya—yakni pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. APBDes, atau Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan tolok ukur efektivitas pemerintahan desa. Kinerja pemerintahan didefinisikan sebagai pelaksanaan rencana, program, atau kebijakan untuk mencapai tujuan dan visi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi (Sofa, 2022). Perusahaan di sektor publik dapat mencapai hasil yang lebih baik ketika pendekatan pengukuran kinerja mempertimbangkan unsur finansial dan non-finansial. Oleh karena itu, lembaga sektor publik harus terbuka dan akuntabel

agar publik dapat berperan dalam menjalankan pemerintahan daerahnya. Oleh karena itu, pengawasan keuangan daerah mengharuskan adanya pemantauan kinerja keuangan pemerintah daerah (Rahmi, 2023).

Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, merupakan desa dengan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan yang cukup besar. Dalam lima tahun terakhir, desa ini menunjukkan peningkatan pendapatan desa yang stabil, terutama dari pengelolaan anggaran pada lima bidang utama: pembangunan, pemberdayaan masyarakat, urusan kemasyarakatan, penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Permasalahan ekonomi di Desa Sendanggayam yang terus dikembangkan yaitu mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat. Berikut rincian pendanaan APBDesa Selama Kurun waktu 5 tahun.

Tabel 1. Sumber Anggaran Dan Pendapatan Desa

Tahun	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi
2019	Dana Desa	1.101.840.000	Terealisasi
2020	BHPR	28.345.055	Terealisasi
2021	PAD	8.500.000	Tidak Terealisasi
2022	ADD	28.739.460	Terealisasi
2023	Banprov	228.247.750	Terealisasi

Sumber Data: Pemerintah Desa Sendanggayam Tahun 2025

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Dari sisi sosial terdapat sedikit permasalahan ketika menentukan batas realisasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan fisik di Desa Sendangggayam, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan fisik masih terbatas karena masyarakat Desa Sendanggayam mayoritas sebagian besar bekerja diluar kota, sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi. Kondisi ini dapat mengurangi

terhambatnya realisasi ABPDesa terutama dalam bidang pembangunan fisik. Dari sisi ekonomi, alokasi dana pembangunan fisik belum sepenuhnya diiringi dengan strategi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun belum optimal dalam meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, perbedaan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan anggaran, ditambah keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang administrasi keuangan, berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBDes.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada bidang pembangunan fisik di Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan lebih menekankan makna data daripada generalisasi (Azmi Nainggolan, 2018). Metode ini memanfaatkan data deskriptif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen resmi, kemudian disusun, dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh (Idrika, Mubyarto, & Anita, 2023).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBDes pada bidang pembangunan fisik di Desa Sendanggayam?
2. Bagaimana kinerja keuangan desa dilihat dari realisasi anggaran bidang pembangunan fisik?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan APBDes dalam pembangunan fisik di Desa Sendanggayam?
4. Bagaimana strategi peningkatan efektivitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan fisik di masa mendatang?

### **Penggunaan Analisis SWOT**

Penelitian ini tidak menjadikan analisis SWOT sebagai metode utama, karena fokus utamanya adalah deskripsi dan

analisis pengelolaan APBDes berdasarkan data realisasi dan wawancara. Namun, prinsip SWOT dapat digunakan secara terbatas sebagai kerangka bantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apabila diperlukan dalam pembahasan strategi.

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena desa ini memiliki potensi pertanian, perkebunan dan peternakan yang cukup besar serta mengalami peningkatan pendapatan desa yang stabil dalam lima tahun terakhir. Waktu penelitian dilaksanakan April-September 2025.

#### Responden Penelitian

Responden dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang memiliki informasi langsung dan relevan mengenai pengelolaan APBDes pada bidang pembangunan fisik, antara lain:

Tabel 2. Responden

NO	NAMA	JABATAN
1	A1	Kepala Desa Sendanggayam
2	A2	Sekretaris Desa Sendanggayam
3	A3	Kaur Keuangan
4	A4	Ketua Tim Pengelola Kegiatan
5	A5	Ketua BPD Desa Sendanggayam
7	A6	Ketua RT 002 RW 001 Desa Sendanggayam

Pemilihan responden ini bertujuan memperoleh informasi komprehensif dari aspek kebijakan, teknis pelaksanaan, pengawasan dan perspektif masyarakat.

#### Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer: diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan.
2. Data Sekunder: diperoleh dari dokumen resmi desa seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, peraturan desa, notulen rapat dan arsip lainnya.

### Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan perangkat desa dan masyarakat.
- Observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan fisik dan administrasi keuangan desa.
- Dokumentasi berupa dokumen APBDes, laporan realisasi dan foto kegiatan.

### Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi:

1. Reduksi data—memilah, merangkum dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian.
2. Penyajian data—menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan—menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### 1. Profil Umum Desa Sendanggayam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 mendefinisikan Profil Desa dan Kecamatan sebagai ikhtisar menyeluruh tentang demografi, sejarah, kondisi pembangunan saat ini dan masa mendatang, tantangan yang dihadapi dan potensi sumber daya (baik alam maupun manusia) desa atau kecamatan, serta kelembagaan, infrastruktur, fasilitas dan informasi dasar keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya profil desa dan kecamatan, dokumen-dokumen ini menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pemerintahan tersebut. Akses terhadap informasi yang terpercaya dan terkini sangat penting untuk mengkoordinasikan proyek-proyek pemberdayaan dan pembangunan masyarakat (Prihatmaji dkk., 2013).

Desa Sendanggayam terletak di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memisahkan Banjarejo, Wonosemi, dan Jetakwanger. Desa Sendanggayam pertama kali diberi nama Banjarnyawun—"meminta

ditempatkan"—oleh Pangeran Haryo Sosro Hadi Prawiro, alias Pangeran LangLang Yudo, ketika kota sedang dibangun di wilayah tersebut. Banyaknya pohon gayam di sekitar sumber air utama desa menyebabkan perubahan nama menjadi Sendanggayam, gabungan dari "sendang" (sumur/sumber air) dan "gayam" (pohon gayam).

Selama pembangunan mata air (kolam/sumur), air mengalir begitu deras sehingga raja konon terpaksa menutupinya dengan ijuk (sabut kelapa) agar tidak berubah menjadi danau. Tradisi ini memastikan bahwa pasokan air desa akan terus digunakan untuk keperluan pertanian, serta untuk minum dan mandi. Seni tradisional Kentrung dilestarikan di desa kecil ini. Yanuri, salah satu pengurus, terus memainkan seni bercerita kentrung dimainkan dengan satu rebana pada acara-acara adat, pernikahan, khitanan dan kelahiran.

## 2. Jenis Pembangunan Fisik di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pengembangan Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, mencakup sejumlah kegiatan fisik yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengembangan ini mencakup sejumlah proyek, seperti Waduk Ketapang, jalan beraspal di Dukuh Buraden, sistem drainase beton di RT 006 RW 001, jalan raya RT 002 RW 001, Penerangan Jalan Umum (PJU), pemasangan pipa air bersih dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

### a. Pembangunan Gedung TK

Pembangunan TK PERTIWI merupakan hal penting. TK yang didirikan pada tahun 2007 di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) ini sebelumnya menempati bangunan tua di sebelah SDN Sendanggayam dan didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bangunan tersebut mulai rusak dan akhirnya runtuh, membuatnya tidak dapat digunakan lagi, ketika usianya hampir sepuluh tahun. Oleh karena itu, selama hampir tiga tahun, salah satu rumah guru TK tersebut menjadi tempat belajar mengajar.

Pemerintah Desa Sendanggayam menyadari kebutuhan akan sebuah Taman Kanak-Kanak segera setelah didirikan, sehingga mereka mencari solusi permanen dengan membeli

sebidang tanah di RT 005 RW 001. Dana pembangunan Taman Kanak-Kanak disediakan oleh Desa pada tahun 2024, sementara dana untuk pembelian lahan disediakan oleh Pendapatan Asli Desa (PAD). Semua yang berkaitan dengan pembangunan fisik selesai tepat waktu dan sesuai rencana, tanpa kendala berarti selama pengerjaan di lapangan.

Keterlibatan masyarakat sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan fisik ini, terutama mengingat masih kuatnya rasa gotong royong yang terjalin di Desa Sendanggayam. Salah satu pilar terpenting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat adalah kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang ditunjukkan dengan partisipasi aktif warga dan dukungan mereka terhadap upaya pembangunan.

b. Pembangunan Drainase Cor Beton RT 006 RW 001

Dalam hal proyek pembangunan fisik, sistem drainase beton RT 006 RW 001 termasuk yang paling banyak terlibat. Di Desa Sendanggayam, titik ini sangat rentan terhadap banjir saat hujan. Warga setempat sering mengeluhkan genangan air akibat saluran drainase yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Desa Sendanggayam memasang sistem drainase beton.

Namun, berbagai dinamika komunal muncul sebelum pembangunan dimulai, yang memicu berbagai keuntungan sekaligus kerugian. Beberapa warga menyambut baik rencana pembangunan tersebut karena mereka menganggapnya sebagai solusi permanen untuk masalah lingkungan banjir. Di sisi lain, pembangunan tersebut justru mendapat tentangan dari beberapa warga. Kekhawatiran akan halaman yang semakin sempit, gagal panen akibat kerja keras bertahun-tahun, dan batas-batas properti yang samar hanyalah beberapa alasan mengapa warga menentang proyek drainase tersebut.

Terdapat pula beberapa warga yang rumahnya berada di atas lahan yang sebenarnya merupakan milik Kesatuan Pengelolaan Hutan Perhutani (KPH Perhutani). Pemerintah Desa Sendanggayam berinisiatif mengundang perwakilan dari KPH Perhutani untuk melakukan pengukuran fisik dan penegasan batas lahan di lapangan guna mencegah potensi

konflik lahan dan menjamin pembangunan dapat berjalan sesuai hukum. Hal ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang cermat dan terkoordinasi yang diterapkan.

Gorong-gorong yang ada saat ini dalam kondisi buruk dan tidak mampu menampung debit air yang ada, yang merupakan penyebab utama banjir di wilayah tersebut. Pembangunan gorong-gorong tambahan yang lebih besar sebagai bagian dari rencana pengembangan drainase ini akan memungkinkan pemerintah desa untuk mengalihkan aliran air ke sungai di bagian selatan desa. Warga di RT 006 RW 001 dapat mengharapkan manfaat jangka panjang dari pekerjaan ini, yang merupakan langkah cerdas untuk mengurangi banjir musiman.

Meskipun awalnya terdapat beberapa penolakan, pendekatan persuasif pemerintah desa dan pemahaman bersama masyarakat tentang pentingnya infrastruktur lingkungan yang memadai memastikan pembangunan sistem drainase beton berjalan lancar. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan teknis yang cermat dan komunikasi sosial yang efisien dalam membangun kesepahaman bersama untuk pembangunan fisik di wilayah pedesaan.

#### c. Pembangunan Jalan Paving Dukuh Buraden

Salah satu bagian Desa Sendanggayam yang masih terbelakang adalah Dusun Buraden. Dahulu, jalan-jalan di wilayah ini sangat berbahaya, dengan jalan tanah berbatu yang tidak rata dan dipenuhi kerikil tajam. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur, sementara saat musim kemarau, debu tebal mengepul dan mengganggu aktivitas warga, sehingga menyulitkan akses bagi masyarakat.

Untuk memperlancar mobilitas dan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Desa Sendanggayam mengalokasikan dana dari anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BANPROV) untuk membangun jalan beraspal di Dukuh Buraden. Warga Desa Sendanggayam dan Desa Bacem akan merasakan manfaat dari jalan beraspal baru ini, yang juga akan memperlancar kegiatan komersial, sosial dan layanan publik antara kedua desa.

Kondisi jalan Dukuh Buraden kini jauh lebih baik

dibandingkan sebelum pembangunan. Kini jalannya rata dan mulus, kecelakaan akibat medan yang tidak rata atau curam sudah tidak mungkin terjadi lagi. Jalan tidak lagi berdebu mengganggu di musim kemarau, dan juga tidak becek di musim hujan, sehingga menjamin kenyamanan pejalan kaki maupun pengemudi.

Pembangunan jalan beraspal di wilayah ini merupakan langkah awal menuju pembangunan yang lebih berkeadilan di Desa Sendanggayam, yang mencakup investasi ulang infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya terabaikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menyederhanakan kehidupan sehari-hari mereka, menciptakan peluang bagi pertumbuhan regional dan secara keseluruhan mempermudah kehidupan.

d. Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (KETAPANG)

Sesuai kebijakan pemerintah pusat, setiap desa diwajibkan melaksanakan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) dengan alokasi minimal 15% dari seluruh Dana Desa. Pemeliharaan waduk desa, pemasangan pipa dan pelatihan pembuatan pupuk organik merupakan beberapa kegiatan penting yang membentuk program ini, dan semuanya telah dilaksanakan dengan sempurna di Desa Sendanggayam.

Merawat Embung Ketapang dengan baik merupakan salah satu kontribusi masyarakat terhadap ketahanan pangan dan para petani khususnya telah merasakan manfaatnya. Untuk keperluan irigasi, Embung Ketapang sangat penting bagi sawah-sawah di sekitarnya, terutama yang ditanami padi. Hasil pertanian yang stabil tetap terjaga, bahkan di musim kemarau, ketika Embung Ketapang terawat dengan baik dan petani memiliki akses air yang lebih baik.

Merawat Embung Ketapang dengan baik merupakan salah satu kontribusi masyarakat terhadap ketahanan pangan, dan para petani khususnya telah merasakan manfaatnya. Untuk keperluan irigasi, Embung Ketapang sangat penting bagi sawah-sawah di sekitarnya, terutama yang ditanami padi. Hasil pertanian yang stabil tetap terjaga, bahkan di musim kemarau, ketika Embung Ketapang terawat dengan baik dan petani memiliki akses air yang lebih baik.

Kelompok lain yang merasakan dampak proyek pipa

adalah para petani yang lahannya terletak jauh dari sumber air. Seratus meter dari sumber air, pipa tersebut dapat mengalirkan air dari mata air ke sawah. Karena sulitnya mengairi tanaman mereka, sebelum adanya sistem pipa, para petani hanya dapat memanen padi setahun sekali. Berkat sistem pipa, kini sebagian besar lahan pertanian dapat menanam dua kali dalam satu musim tanam. Oleh karena itu, para petani di Desa Sendanggayam menjadi lebih sejahtera dan pasokan pangan mereka lebih stabil.

Terakhir, inisiatif Ketapang menawarkan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk membantu petani dan peternak memanfaatkan limbah organik, terutama kotoran sapi, dengan lebih baik. Pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi peternak yang tidak memiliki lahan luas untuk membuang kotoran ternak. Pelatihan ini mengajarkan cara mengolah kotoran sapi, yang dulunya berbau busuk dan mencemari lingkungan, menjadi pupuk organik yang tidak merusak lingkungan. Padi, jagung dan tanaman pangan lainnya selanjutnya dapat memperoleh manfaat dari pupuk ini.

Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., secara langsung menghadiri dan mengapresiasi pelatihan ini, serta mengajak seluruh desa untuk mendukung inisiatif pertanian berkelanjutan. Para pembicara dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Blora, yang merupakan spesialis pengolahan pupuk organik dari kotoran hewan, diundang oleh Pemerintah Desa Sendanggayam untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat desa merupakan dua tujuan dari kemitraan ini.

### 3. Efektivitas APBDesa dalam Mengatasi Masalah Ekonomi

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, APBDesa dapat dialokasikan untuk berbagai program yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti: pembangunan infrastruktur desa, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengurangan kemiskinan melalui program-program yang terarah, APBDesa dapat membantu mengurangi kemiskinan di desa. Misalnya: melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha dan program jaminan sosial.

#### 4. Efektivitas APBDesa dalam Mengatasi Masalah Sosial

Sosial ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dapat diketahui dan dimengerti baik itu oleh pihak internal maupun eksternal Pemerintah Desa. Terkait dengan pembangunan desa berkelanjutan yang tentu sangat diharapkan seluruh elemen masyarakat bisa terlibat dan turut membantu. Sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan desa berkelanjutan ini juga diadakan musyawarah yang melibatkan setiap elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan sekretaris desa yang mengatakan: “APBDes tetap merupakan hasil musyawarah mufakat tim RKP yang diambil dari setiap dusun termasuk melibatkan BPD selaku pihak pengawasan di desa dan mereka yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian juga ketika anggaran desa ini sudah disahkan, maka akan kita ditampilkan di papan-papan pengumuman termasuk media-media yang kita sampaikan terutama terkait dengan penggunaan sumber-sumber dana yang diperoleh baik Dana Desa, ADD, PAD, BHP. Kemudian sumber-sumber dana yang diperoleh tersebut dialokasikan ke dalam 4 program yaitu bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Kadang-kadang masyarakat melihat dana desa itu besar, akan tetapi sebenarnya itu kecil karena disalurkan keempat pos-pos tersebut. Koordinasi kita tidak terlepas dari DPMD selaku dewan pembina di kabupaten dan desa. Biasanya per triwulan atau 6 bulan sekali mereka turun untuk memberikan pembinaan. Jika mereka sedang ada kesibukan, maka kita yang menjemput bola mendatangi langsung DPMD untuk koordinasi. Oleh karena itu Pemerintah Desa tidak berani untuk memutuskan sendiri. Jadi harus berdasarkan “musyawarah mufakat”. Dengan demikian dari beberapa pernyataan pihak Pemerintah Desa dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi sangat penting untuk dilakukan baik itu dalam bentuk koordinasi dengan pihak di atasnya maupun dengan masyarakat desa sendiri. Melihat prospek dari program yang dilakukan akan berdampak besar untuk kemajuan desa sendiri.

APBDesa atau anggaran tahunan untuk pendapatan dan belanja desa, disusun oleh Pemerintah Desa setiap tahun. APBDesa adalah rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa. RPJMDes, atau program pembangunan jangka menengah desa, merupakan cetak biru untuk program pembangunan desa tahunan dan mencerminkan tujuan dan sasaran kepala desa. Rencana kerja tahunan untuk melaksanakan program dan layanan pembangunan di desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang merangkum program-program tersebut.

Pemerintahan desa yang lebih terbuka dan akuntabel akan menjaga pengeluaran tetap terkendali, sehingga memungkinkan alokasi dana yang lebih tepat untuk inisiatif-inisiatif yang akan mendorong perekonomian lokal. Salah satu cara untuk menilai Pemerintahan Desa adalah seberapa transparannya pemerintahan tersebut terhadap masyarakat dan bagaimana ia mendistribusikan dananya. Kepala desa dan otoritas desa lainnya dapat memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan cara ini.

Sebelum mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan, Pemerintah Desa meminta masukan dari seluruh lapisan masyarakat melalui Musyawarah Desa (MusDes). Setelah rancangan APBDes selesai dan disusun, rancangan tersebut perlu dibahas dalam Musyawarah Desa (MusDes) di Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, untuk menentukan usulan yang akan disahkan.

Kemampuan pemerintah dikategorikan jika rasio efektivitas tinggi, maka sama halnya semakin baik kinerja Pemerintah Desa. Untuk itu tingkat efektivitas digunakan supaya mengetahui keberhasilan tidak nya Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan anggaran yang dibuat oleh desa. Untuk menganalisis kondisi tersebut dibutuhkan pencapaian efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja menggunakan rumus Rasio Efektivitas, Berikut rumus rasio efektivitas:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Keuangan Desa

Kemampuan keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efektif	100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	60%

Sumber: Pemerintah Desa Sendanggayam Tahun 2025

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sendanggayam:

Tabel 4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Sendanggayam

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi	Kategori
1	ADD	448.300.000	445.595.344	99%	Efektif
2	DD	935.318.000	935.318.000	100%	Sangat Efektif
3	BHPR	35.135.300	34.595.600	98%	Efektif
4	PBK	100.000.000	100.000.000	100%	Sangat Efektif
5	PBP	450.000.000	450.000.000	100%	Sangat Efektif

Sumber: info grafis desa sendanggayam Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 4, diketahui bahwa terdapat lima sumber pendanaan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di desa, yakni: Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Bantuan Keuangan (PBK), serta

Pendapatan Bukan Pajak (PBP).

Dari keseluruhan sumber anggaran tersebut, empat di antaranya menunjukkan tingkat realisasi sebesar 100%, yaitu: Dana Desa (DD), BHPR, PBK dan PBP. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh alokasi anggaran dari sumber-sumber tersebut telah direalisasikan secara maksimal dan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, pada pos Alokasi Dana Desa (ADD) tercatat bahwa dari total anggaran sebesar Rp 448.300.000, yang terealisasi sebesar Rp 445.595.344, atau setara dengan 99%. Selisih sebesar Rp2.704.656 (1%) tidak terealisasi dan sesuai dengan ketentuan, dana tersebut telah disilpakan (dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan dikembalikan ke Rekening Kas Desa. Dana silpa ini selanjutnya akan digunakan sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan pada tahun anggaran 2025, sesuai dengan hasil musyawarah desa dan peraturan yang berlaku.

Tingkat realisasi anggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa desa memiliki kinerja pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT adalah metode perencanaan model, strategis dan pengembangan usaha yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi pembangunan berkelanjutan.

Adapun berbeda hasil dari analisis SWOT terhadap pengelolaan APBDesa dalam bidang pembangunan fisik demi kemajuan Desa Sendanggayam adalah sebagai berikut.

Tabel 5. ANALISIS SWOT

Kategori	Uraian Analisis
Kekuatan ( <i>Strengths</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemerintah Desa menunjukkan kepedulian sosial melalui prioritas anggaran untuk perbaikan rumah warga.</li> <li>● Data penerima bantuan jelas dan transparan (<i>by name by address</i>).</li> <li>● Pekerjaan renovasi difokuskan pada elemen penting seperti: atap, kayu penyangga dan pondasi, serta meningkatkan keamanan struktural rumah.</li> <li>● Meningkatkan kenyamanan dan martabat hidup warga penerima bantuan.</li> </ul>
Kelemahan ( <i>Weakness</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah penerima bantuan masih terbatas (hanya 6 rumah), belum mencakup seluruh warga yang berpotensi membutuhkan.</li> <li>● Keterbatasan anggaran menyebabkan program bersifat selektif, belum berkelanjutan.</li> <li>● Belum ada sistem evaluasi pasca renovasi untuk memastikan kualitas konstruksi jangka panjang.</li> </ul>
Peluang ( <i>Opportunities</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Potensi kerja sama dengan program bantuan provinsi atau nasional seperti <i>BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)</i>.</li> <li>● Peningkatan kualitas hidup warga bisa mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa lainnya.</li> <li>● Memberikan motivasi sosial kepada warga lain untuk memperbaiki rumah secara swadaya.</li> <li>● Bisa dijadikan dasar pengajuan anggaran lanjutan tahun berikutnya.</li> </ul>

Ancaman ( <i>Threats</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jika tidak ada pemeliharaan, bangunan rumah yang sudah diperbaiki berisiko kembali rusak.</li> <li>● Ketimpangan sosial jika penerima bantuan tidak merata atau tidak tepat sasaran.</li> <li>● Cuaca ekstrem atau bencana alam berpotensi merusak hasil renovasi.</li> <li>● Terbatasnya tenaga ahli lokal dalam perbaikan konstruksi bisa memengaruhi kualitas hasil.</li> </ul>
--------------------------------	---

## **PENUTUP**

Proyek pembangunan fisik di Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), telah berjalan sesuai rencana. Pembangunan Taman Kanak-kanak Pertiwi, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pengaspalan jalan di Dukuh Buraden, pemasangan lampu penerangan jalan dan pipa, serta jaminan ketahanan pangan (Ketapang) melalui pemeliharaan waduk desa dan pelatihan pupuk organik merupakan contoh kegiatan fisik yang telah dilakukan.

Membeli lahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendanai pembangunan gedung baru dengan Dana Desa 2024 merupakan solusi penting bagi kondisi bangunan lama yang runtuh, yang akan menjadi tempat TK tersebut. Warga telah menyatakan dukungan dan penolakan terhadap proyek drainase di RT 006 RW 001, yang sedang dibangun sebagai respon terhadap kekhawatiran banjir. Pemerintah desa merespon dengan pendekatan persuasif dan kolaborasi lintas instansi, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Perhutani (KPH Perhutani). Sementara itu, di Dukuh Buraden, jalan beraspal baru menghubungkan masyarakat yang sebelumnya belum berkembang.

Kegiatan ketahanan pangan pun memberikan dampak positif, terutama bagi petani dan peternak. Embung desa dan

pipanisasi mendukung pengairan sawah secara merata, sehingga meningkatkan intensitas panen. Pelatihan pembuatan pupuk organik juga memberi manfaat bagi peternak dalam mengolah limbah ternak menjadi pupuk ramah lingkungan. Seluruh kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Sendanggayam dalam menjalankan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan semangat gotong royong yang tinggi.

Berdasarkan hasil Tabel 2 rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Sendanggayam Tahun 2024 dapat disimpulkan hampir secara keseluruhan 5 bidang dalam Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Sendanggayam Tahun 2024 sudah direalisasikan sepenuhnya dengan capaian rata-rata persentase 100%.

1. Pemerintah Desa Sendanggayam diharapkan terus mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan.
2. Diperlukan pendekatan sosial yang lebih intensif terhadap warga yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur, seperti drainase, agar tidak menimbulkan penolakan atau konflik.
3. Pemerintah desa perlu melanjutkan program ketahanan pangan dengan memperluas jangkauan pipanisasi ke lahan pertanian yang belum terakses, serta menambah frekuensi pelatihan pertanian berkelanjutan.
4. Pelaksanaan pembangunan fisik perlu disertai dengan dokumentasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang transparan untuk memastikan akuntabilitas anggaran desa.
5. Dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta KPH Perhutani perlu terus dibangun melalui sinergi program lintas sektor, terutama dalam mendukung kegiatan desa yang berbasis pada lingkungan dan pertanian.

- DAFTAR PUSTAKA** Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52 (2).
- Rodriguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? *Regional Studies*, 47 (7), 1034-1047.
- Ahrori, A. (2011). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes (Studi tentang pola hubungan pemerintah desa dan masyarakat desa Pucangsari Kecamatan Purwadadi Kabupaten Pasuruan) (PhDThesis). University of Muhammadiyah Malang.
- Akbar, D. L. (2015). Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDEs Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal) (PhD Thesis). Universitas Negeri Semarang.
- Harigunna, T., & Arinta, O. (2018). Penentuan Prioritas Program Kerja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. Retrieved
- Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Sarjanawiyata Tamansiswa Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5 (1), 168-184. <https://doi.org/10.474776/reslaj.v6i3.5916>
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35 (5), 347-359.. Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS*. Andi Offset.
- Susan, N., & Budirahayu, T. (2018). Village Government Capacity in the Implementation of Village Law No. 6 of 2015 in Indonesia. *Sustainable Future for Human Security*, 17-27. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4_2).
- Budiman, F. (2020). Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1192>

- Chen, Y., & Riordan, M. H. (2013). Profitability of product bundling. *International Economic Review*, 54 (1). <https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2012.00725.x>
- Dewi, R. (2021). Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bina Buana Semesta. *JEBI) Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 16 (1), 21. [www.jurnal.stiebi.ac.id](http://www.jurnal.stiebi.ac.id)
- Fathoni, M. A., Faizi, & Sari, R. (2023). Determinasi Pembelian Makanan Halal Melalui Platform Digital: Kesadaran Halal Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (01), 45–54.
- Ferdiana Fasha, A., Rezqi Robi, M., & Windasari, S. (2022). Determinasi Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli: Brand Ambassador dan Brand Image (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3 (1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.840>
- Handayani, N., & Hidayat, F. (2019). Hubungan Kemandirian terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika di Kelas X SMK Kota Cimahi. *Journal On Education*, 1 (2).
- Haryati, T., Wahid, J., & Prodi. (2018). Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian (Studi Pada Wardah Beauty House Surabaya). *Sketsa Bisnis*, 5 (2).
- Hudayana, F. N. (2023). *Pengaruh persepsi sertifikasi halal, harga dan influencer review produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik Somethinc bagi mahasiswa UIN Walisongo*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ipan Hilmawan. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening. *Rekaman : Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 3 (3), 154–166. <http://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/article/view/21>
- Kamaluddin, K., & Muhajirin, M. (2018). Pengaruh Gaya Hidup terhadap Minat Beli Konsumen dalam Berbelanja Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE BIMA). *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3 (3).
- Kotler, P., & Lee, N. (2011). *Social marketing: influencing*

- behaviors for good. Global trends and success stories. In *Choice Reviews Online* (Vol. 45, Issue 10).
- Mardiyono, F., & Digidowiseiso, K. (2023). Effect of Product Quality, Promotion and Personal Selling on Purchase Decisions Through Intention to Buy Amazink Ink Consumers in Cirebon City. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4 (2), 481–506. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i2.2989>
- Neolaka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Remaja Rosdakarya.
- Partini, S. T. (2022). Bulletin of Management and Business. *Bulletin of Management and Business*, 3 (1).
- Pratiwi, D. P., & Falahi, A. (2023). Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10 (1). <https://doi.org/10.54131/jbma.v10i1.148>
- Prilano, K., Sudarso, A., & Fajrillah, F. (2020). Pengaruh Harga, Keamanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Toko Online Lazada. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1 (1). <https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.56>
- Purwati, A., & Cahyanti, M. M. (2022). Pengaruh Brand Ambassador dan Brand Image terhadap Minat Beli yang Berdampak pada Keputusan Pembelian. *Iqtishaduna*, 11 (1), 32–46. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.526>
- Putri, A. A., & Wibowo, S. (2017). Pengaruh Strategi Bundling Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Bee Outbound Bogor). *E-Proceeding of Applied Science*, 3 (2).
- Rahman, A., Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, F., & Kata Kunci, A. (2020). Model pola konsumsi mahasiswa dilihat dari literasi keuangan Student consumption pattern model seen from financial literation. *Forum Ekonomi*, 22 (2), 165–176. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Rahmat, A. F., Dedy Ansari Harahap, & Nindya Saraswati. (2023). Pengaruh Advertising, Brand Ambassador dan Product Bundling terhadap Purchase Decision pada

- Produk Scarlett Whitening. *Bandung Conference Series: Business and Management*, 3 (2).  
<https://doi.org/10.29313/bcsbm.v3i2.8010>
- Rizqi, Z. U. (2019). Implementation of association rule-market basket analysis in determining product bundling strategy: Case study of retail businesses in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Sadewa, A. (2023). Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Haus! Bandung, Indonesia. *International Journal Administration, Business & Organization*, 4, 1-8.  
<https://doi.org/10.61242/ijabo.23.269>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam : The Leader's Writing*, 3 (1).
- Saputra, A. A., & Jaharuddin, J. (2022). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa Feb Umj). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16 (4).  
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1185>
- Saputri, O. B., & Huda, N. (2020). Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media Sosial terhadap Perilaku Konsumen. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7 (2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7213>
- Sarah, S. F., & Artanti, Y. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Pembelian. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8 (1).  
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.6732>
- Sari, P. R., Hendayana, Y., & Wijayanti, M. (2023). Pengaruh Social Media Marketing, Brand Ambassador Dan Bundling Product Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Ms Glow Di Bekasi Utara. *Jurnal Economina*, 2 (9), 2579-2595.  
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.835>
- Sari, S. P. (2020). Hubungan Minat Beli Dengan Keputusan Pembelian Pada Konsumen. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8 (1), 147.

- <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i1.4870>  
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2016). *Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D., & Saksono, Y. (2022). Perilaku Konsumen. In M. A. Kalijaga (Ed.), *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6 (1).
- Tamara, A. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera). In *Skripsi*.
- Triana, U. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9 (2), 3.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7711>
- Ulfa, R. (2019). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Keilaman*.
- Wibasuri, A., Tamara, T., & Adi Sukma, Y. (2020). Measurement Social Media Marketing dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Aplikasi Online Shopee. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian*.
- Widyaningrum, P. W. (2018). Pengaruh Label Halal, Asosiasi Merek, Iklan, dan Celebrity Endroser terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen Wardah Di Malang. *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1 (2).  
<https://doi.org/10.25273/capital.v1i2.2318>
- Widyawati, S., Putri, H. R., & Oktarina, V. D. (2022). Management Case Of Post Phakic Intraocular Lens Implant In High Myopia With Complicated Cataract After Vitrectomy: Post Surgery Challenges. *International Journal of Retina*, 5 (2).  
<https://doi.org/10.35479/ijretina.2022.vol005.iss002.196>

- Wijaya, A., & Kinder, L. (2020). Pengaruh Price Bundling dan Product Bundling terhadap Niat Membeli yang Dimoderasi oleh Barang Komplementaritas. *Jurnal Manajemen*, 17 (1).  
<https://doi.org/10.25170/jm.v17i1.866>
- Witarsana, I. G. A. G., Pramana, I. D. P. H., Prabawati, N. P. D., Puja, I. B. P., & Pinatih, I. M. D. P. (2022). Pengaruh Sales Promosi dengan Price Bundling terhadap Keputusan Pembelian Masa Pandemi Covid 19 di Bali. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 6 (2), 89–109.  
<https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1445>
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23 (4), 688–699.  
<https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>